

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI MALUKU

Rahima Kaliky¹⁾, Sunarru Samsi Hariyadi²⁾, Sri Peny Wastutiningsih²⁾, P. Wiryono Priyotamtomo³⁾

¹⁾BPTP Yogyakarta ²⁾Fakultas Pertanian UGM

³⁾Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRACT

The objectives of the research to examine the characteristics of agricultural extension workers and its relation to the implementation of agricultural extension in the province of Moluccas. The study was conducted by survey method in the city of Ambon, Central Moluccas district, and district of West Seram. Determination of the location by a simple random method. Study sample are agricultural extension workers civil servants and THL-TBPP taken as many as 80 people with similar methods. The results showed the level of agricultural extension workers education in the Moluccas is still dominated by high school level. Low levels of education have an impact on the performance of agricultural extension, as seen from the average agriculture extension which make up the programa counseling, only 37% and 52% of that percentage does not integrate with existing agricultural development programs in the area. 46.7% of agricultural extension workers are less able to make a script extension in the form of radio scripts, TV scripts, and print media. In 2010 the agricultural extension workers in the province of Moluccas who can use the Internet only 13.7%. 80% of the agricultural extension workers rely on tabloid Sinar Tani as a source of agricultural information technology. To improve the quality and performance of agricultural extension in the region is increasing levels of education and training is an urgent thing.

Key words: agricultural extension workers, performance, Moluccas province

PENDAHULUAN

Maluku merupakan salah satu provinsi di Indonesia Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibanding tingkat kemiskinan nasional. 33 % penduduk di Maluku adalah penduduk miskin. 80,96 % dari jumlah tersebut berada di pedesaan dan 77,11 % diantaranya bekerja di sektor pertanian. Artinya populasi penduduk miskin di Maluku umumnya adalah petani, meskipun tingkat pemilikan lahannya cukup tinggi yakni 0,8-6 ha (BPS 2007; Kaliky. R., *et all.* 2007). Salah satu upaya untuk membantu petani agar keluar dari permasalahan kemiskinan adalah memproduktifkan lahan dan meningkatkan produktivitas pertaniannya. Menurut Suryana (2005), permasalahan mendasar yang berkaitan dengan upaya menjadikan pertanian sebagai landasan bagi pembangunan ekonomi nasional diantaranya adalah proses difusi teknologi

pertanian di tingkat petani. Berbicara tentang adopsi dan difusi teknologi pertanian tidak dapat dilepaskan dengan proses penyuluhan pertanian. Hal pokok yang dibicarakan dalam penyuluhan pertanian adalah penggabungan pengetahuan dan keputusan sehingga faktor-faktor tanah, air, iklim dan modal dapat di dayagunakan secara optimal. Penyuluhan pertanian memformulasikan dan mendiseminasikan pengetahuan dan mengajari petani untuk menjadi menejer didalam usahanya sendiri.

Dalam upaya membantu petani untuk mencapai tujuannya para penyuluh dapat memanfaatkan berbagai cara seperti dikemukakan oleh van den Ban dan Hawkins (1999) yaitu: memberi nasehat secara tepat waktu guna menyadarkannya tentang suatu masalah; menambah kisaran alternatif yang dapat menjadi pilihannya; memberi informasi mengenai konsekuensi yang dapat diharapkan dari masing-

¹⁾BPTP Yogyakarta ²⁾Fakultas Pertanian UGM ³⁾Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

masing alternatif; membantunya dalam memutuskan tujuan mana yang paling penting; membantunya dalam mengambil keputusan secara sistematis baik secara perorangan maupun berkelompok; membantunya belajar dari pengalaman dan dari pengujian; dan mendorongnya untuk tukar menukar informasi dengan rekan petani. Lebih lanjut van den Ban dan Hawkins (1999) mengatakan, dalam upaya membantu petani untuk mencapai tujuannya agen penyuluhan dapat memanfaatkan berbagai cara yaitu: memberi nasehat secara tepat waktu guna menyadarkannya tentang suatu masalah; menambah kisaran alternatif yang dapat menjadi pilihannya; memberi informasi mengenai konsekuensi yang dapat diharapkan dari masing-masing alternatif; membantunya dalam memutuskan tujuan mana yang paling penting; membantunya dalam mengambil keputusan secara sistematis baik secara perorangan maupun berkelompok; membantunya belajar dari pengalaman dan dari pengujian; dan mendorongnya untuk tukar menukar informasi dengan rekan petani.

Hal tersebut berarti bahwa tujuan penyuluhan adalah untuk memberi informasi dan pilihan alternatif dalam pengambilan keputusan dan membantu membangun dinamika petani hingga terbangun suatu sikap positif terhadap suatu inovasi baik aspek kognitif (kesadaran/pemikiran), afektif (prasaan/kecenderungan bersikap) maupun konatif (kecenderungan berperilaku). yang bermuara pada perubahan perilaku petani didalam berusahatani. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat ditentukan oleh kinerja penyuluh. Bagi

seorang penyuluh pertanian, kinerja merupakan perwujudan diri atas sejauhmana tugas pokoknya dapat dilaksanakan (Leilani, A. dan Amri Jahi, 2006). Lebih lanjut Leilani, A. dan Amri Jahi (2006) mengatakan kinerja seorang penyuluh dapat dilihat diantaranya dari dari karakteristik individunya.

Menurut Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku (Bakorluh Maluku, 2009) permasalahan ketenagaan penyuluhan pertanian di Maluku adalah kompetensi penyuluh pertanian masih belum sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Hal tersebut menyebabkan rendahnya kemampuan dan kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya sehingga menurunkan kredibilitas penyuluh dimata petani.

Berdasar hal tersebut perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengkaji karakteristik penyuluh di Maluku yang meliputi umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan satuan pangkal administrasi (satmingkal) penyuluh dan kaitannya dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Maluku yang meliputi program, mekanisme kerja, dan metode, serta materi penyuluhan. Disamping hal tersebut penelitian ini juga mengkaji aksesibilitas penyuluh pertanian pada transportasi, komunikasi, dan teknologi, guna memperoleh data dan informasi sebagai input bagi pembuat kebijakan penyuluhan pertanian di Maluku dalam upaya memperbaiki kinerja dan kontribusi penyuluhan bagi pembangunan pertanian di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan metode Survei pada bulan Juli - November 2010. Lokasi penelitian meliputi kota Ambon (tingkat provinsi), kabupaten Maluku Tengah, dan kabupaten Seram Bagian Barat. Penentuan lokasi dengan metode acak sederhana (*simple random*). Jumlah sampel sebanyak sebanyak 80 sampel yang diambil dengan metode yang sama. Data dianalisis dengan statistik deskriptif menggunakan SPSS versi 16.

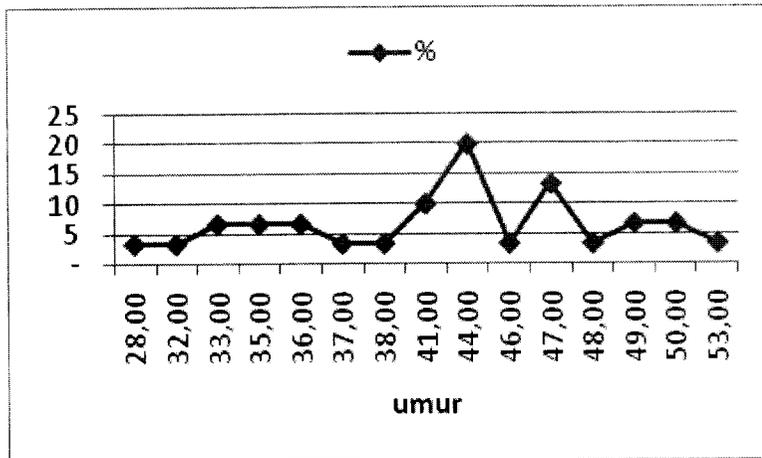
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Penyuluh Pertanian

a. Umur

Informasi tentang jumlah penyuluh berdasar kelompok umur penting dianalisisi guna

mengetahui masa aktif kerja penyuluh (PNS) dan perencanaan perekrutan yang tepat berdasar kebutuhan tenaga penyuluh secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan lebih dari 50 % penyuluh pertanian di Maluku berumur > 40 tahun seperti terlihat pada Gambar 1. Sebagian besar penyuluh pertanian di Maluku adalah penyuluh pertanian trampil dengan jabatan fungsional sebagian besar masih dibawah penyuluh pertanian penyelia. Sesuai Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2010 batas usia pensiun (BUP) penyuluh dengan jabatan fungsional dibawah penyuluh pertanian penyelia adalah 56 tahun. Dengan demikian, 13 % penyuluh di Maluku akan pensiun dalam waktu kurang dari 10 tahun kedepan seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik profil umur penyuluh pertanian di Maluku tahun 2010
 Sumber : Analisis data primer

Guna penyelenggaraan penyuluhan yang berkesinambungan dan produktif, seyogyanya Pemda Maluku mulai mempersiapkan rencana perekrutan penyuluhan sesuai kualifikasi yang diperlukan.

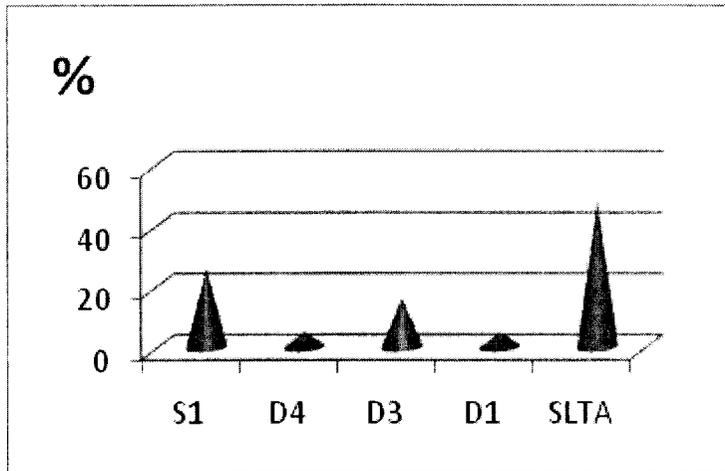
b. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat dan

¹⁾BPTP Yogyakarta ²⁾Fakultas Pertanian UGM ³⁾Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

berlangsung di sekolah (Ahmadi dan Ubbiyati,2001) yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif dalam membentuk manusia seutuhnya. Aktivitas

pendidikan tersebut mempunyai bertujuan mencerdaskan dan mengembangkan kemampuan aspek kognisi, afeksi, dan konasi. Tingkat pendidikan para penyuluh pertanian di Maluku masih didominasi setingkat SLTA seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Profil tingkat pendidikan penyuluh di Maluku tahun 2010
Sumber : Analisis data primer

Gambar 2 menunjukkan tingkat pendidikan penyuluh pertanian di Maluku umumnya masih rendah. Untuk meningkatkan kinerja penyuluh di wilayah tersebut diperlukan suatu rencana dan program pengembangan penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kualifikasinya. Dengan komposisi penyuluh pertanian seperti tersebut maka akan sulit bagi lembaga penyuluhan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan pertanian di provinsi Maluku.

c. Pendidikan non formal

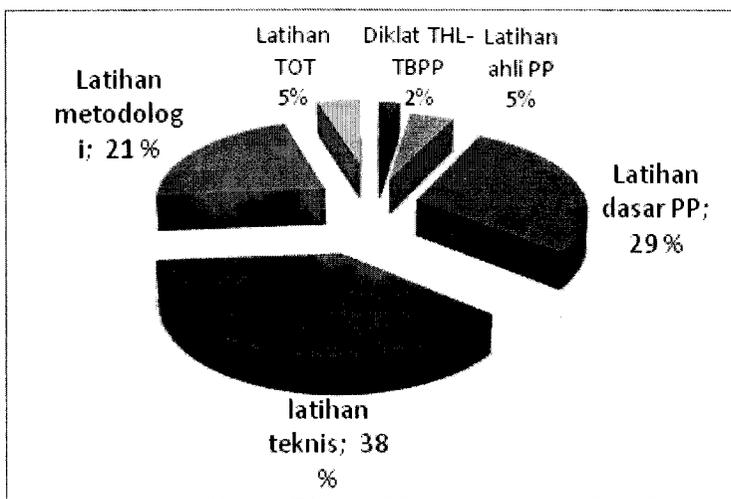
Pendidikan nonformal, menurut *The South & East Asian Ministry of Education*

Organization, adalah setiap upaya pendidikan dalam arti luas yang di dalamnya terdapat komunikasi yang teratur dan terarah, diselenggarakan di luar subsistem pendidikan formal, sehingga seseorang atau kelompok memperoleh informasi, latihan, dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan hidupnya. (<http://ririniest.wordpress.com>). Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional; satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar,

pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis (UU No 20 tahun 2003).

Mengingat tingkat pendidikan formal sebagian besar penyuluh pertanian di Maluku masih relatif rendah (SLTA), maka untuk meningkatkan kualitas mereka, perlu ditempuh

melalui berbagai jalur pendidikan diantaranya adalah jalur pendidikan non formal. Jenis pelatihan yang banyak diikuti para penyuluh di Maluku berturut-turut adalah latihan teknis pertanian, latihan dasar penyuluh pertanian, dan latihan metodologi penyuluhan, seperti terlihat pada (Gambar 3).

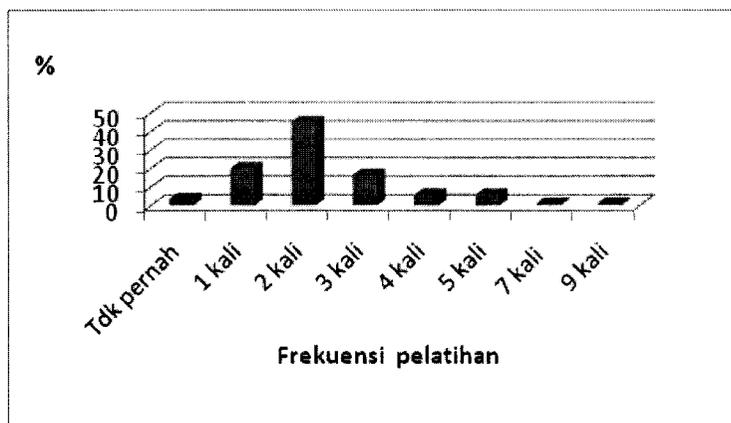


Gambar 3. Profil jenis pelatihan yg diikuti penyuluh pertanian di Maluku

Sumber : Analisis data primer,2010

Penyuluh pertanian di Maluku umumnya pernah mengikuti pelatihan dengan frekuensi 0-9 kali. 40 % penyuluh pernah mengikuti pelatihan sebanyak

2 kali sedangkan yang mengikuti pelatihan 7 dan 9 kali masing-masing hanya 1 % selama menjadi penyuluh seperti terlihat pada gambar 4.



Gambar 4. Frekuensi pelatihan penyuluh pertanian di Maluku

Sumber : Analisis data primer,2010

¹⁾BPTP Yogyakarta ²⁾Fakultas Pertanian UGM ³⁾Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Jenis pelatihan yang diberikan kepada para penyuluh di Maluku umumnya hanya bersifat teknis dan belum diberikan pelatihan yang bersifat *soft skill* seperti teknis komunikasi dan persuasi. Penguasaan teknis komunikasi dan persuasi bagi seorang penyuluh merupakan sesuatu yang yang bersifat keharusan. Dengan memahami cara komunikasi yang baik dalam persuasi kepada kliennya akan sangat membantu dalam pencapaian konvergenitas (kesepahaman) komunikasi. Kincaid & Schramm (1977) mengatakan bahwa model komunikasi konvergensi merupakan model komunikasi yang dinamis dalam memperoleh kesepahaman kemunikasi. Tugas seorang penyuluh adalah meyakinkan kliennya terhadap pesan yang dia sampaikan. Pesan itu akan diterima dan diterapkan bila sang penyuluh (komunikator) dan kliennya (petani) memiliki pemahaman yang sama pada pesan yang dikomunikasikan.

d. Satuan pangkal administrasi (Satmingkal)

Sejak diserahkan urusan penyuluhan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi tenaga penyuluh, biaya dan institusi penyuluhan pertanian (BPP) serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian nomor 539/Kpts/Lp.120/7/1991, maka semua satuan pangkal administrasi penyuluh pertanian berada di Dinas Pertanian. Kecuali penyuluh pertanian yang berada di BPTP yang tetap menjadi PNS pusat. Dengan adanya revitalisasi penyuluhan pertanian yang dicanangkan oleh Presiden RI

tahun 2005 di Jawa Barat, yang dipertegas dengan diterbitkan UU No. 16 tahun 2006 dimana salah satu amanat UU tersebut adalah pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian dari pusat hingga desa.

Kelembagaan penyuluhan yang dibentuk di tingkat kabupaten di Maluku umumnya belum sesuai dengan UU. Karena alasan keterbatasan anggaran daerah maka lembaga penyuluhan di tingkat kabupaten tidak berdiri sendiri sebagai Badan Pelaksana penyuluhan Pertanian (Bappeluh) melainkan menyatu dengan ketahanan pangan dalam satu institusi yang bernama Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKPP). Dengan demikian maka satmingkal penyuluh mengalami pergeseran, ada yang di Dinas teknis, ada yang sudah dipindahkan ke BKPP. Satmingkal penyuluh pertanian di Maluku tahun 2010 tersebar di Lingkup dinas Pertanian 83 %, BKPP 10 %, dan BPTP 7 %,

Berdasar wawancara dengan *key person* baik di Dinas Pertanian maupun di BKPP pada Juli 2010, tergambar bahwa sedang terjadi perebutan SDM penyuluh antara Dinas lingkup Pertanian dengan BKPP. Sesuai UU SP3K 2006 lembaga yang memayungi SDM penyuluh di tingkat kabupaten adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang dalam ini diwujudkan dalam bentuk Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKPP). Hingga saat penelitian ini dilakukan, Dinas terkait merasa keberatan melepas SDM penyuluh dengan pertimbangan para penyuluh adalah pelaksana program Dinas di pedesaan. Hal tersebut

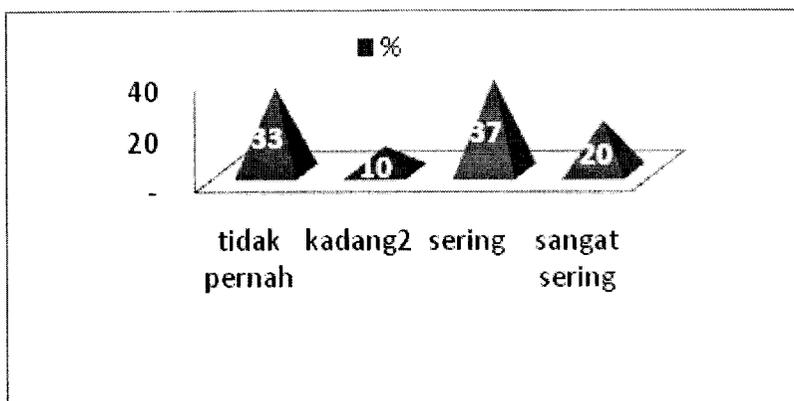
menunjukkan adanya persepsi yang keliru terhadap tupoksi penyuluh oleh instansi-instansi tersebut akibat lemahnya koordinasi antar institusi yang membutuhkan SDM penyuluhan.

B. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan (SP3K) diantaranya meliputi program penyuluhan, mekanisme kerja dan metode penyuluhan, serta materi penyuluhan. Disamping program penyuluhan, mekanisme kerja, metode penyuluhan, dan materi penyuluhan, penelitian ini juga mengkaji aksesibilitas penyuluh pertanian pada transportasi, komunikasi, dan teknologi.

a. Programa Penyuluhan

Pengertian program penyuluhan berbeda dengan program penyuluhan. Menurut Yayasan Pengembangan Sinar tani (2001), program penyuluhan adalah pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan tata cara mencapai tujuan dengan bentuk yang sistematis. Sedangkan program penyuluhan adalah daftar acara kegiatan penyuluhan sebagai rencana kegiatan yang disusun sistematis atas dasar urutan waktu pelaksanaannya pada program penyuluhan. Dari program penyuluhan yang disusun di tingkat BPP/WKBPP kemudian diuraikan menjadi rencana kerja kegiatan penyuluhan di tingkat desa/WKPP. Hasil penelitian menunjukkan 33 % penyuluh pertanian di Maluku tidak menyusun program penyuluhan seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5 . Profil keaktifan penyuluh pertanian menyusun program penyuluhan di Maluku tahun 2010
Sumber : Analisis data primer,2010

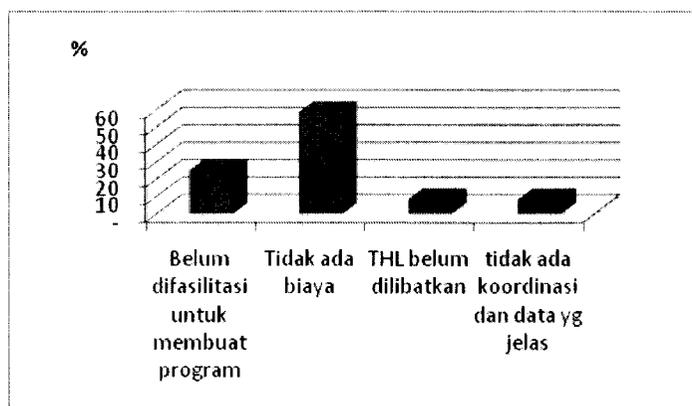
Gambar 5 menunjukkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Maluku masih belum dijalankan berdasar suatu perencanaan yang matang secara reguler. Padahal prinsip perencanaan program diantaranya adalah bekerja berdasarkan kebutuhan yang dirasakan/*felt-need*

(Pesson, 1966 dalam Yustina,2003) dalam hal ini adalah kebutuhan yang dirasakan petani. Kondisi ini tentu akan berdampak pada melambatnya adopsi dan difusi inovasi teknologi dan informasi program pembangunan pertanian pada umumnya di Maluku.

Penyusunan program dan program penyuluhan secara reguler sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan pertanian mengingat manfaat penyusunan program sebagaimana dikemukakan oleh Pesson (1966) yaitu (1) sebagai acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya; (2) sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap usul/ saran penyempurnaan suatu hal yang baru (3) menjadi pedoman untuk mengukur (mengevaluasi) pelaksanaan program; dan (4) memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi. Disamping itu program penyuluhan disusun dengan tahapan proses: (a) pengumpulan data, (b) analisis keadaan, (c) identifikasi masalah, (d) perumusan tujuan, (e) penyusunan rencana kegiatan, (f) pelaksanaan rencana kegiatan, (g)

menentukan kemajuan kegiatan, dan (h) rekonsiderasi (pertimbangan kembali) dan pada setiap tahapan dapat dilakukan evaluasi sehingga memungkinkan dilakukan penyempurnaan pada setiap tahap (Yustina, 2003).

Penelitian Wastutiningsih *et al* (2010) di kabupaten Seram Bagian Barat provinsi Maluku menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah program penyuluhan. Dengan demikian apabila program penyuluhan pertanian tidak disiapkan sebagaimana mestinya maka berdampak kontra produktif terhadap efektifitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian itu sendiri. Permasalahan yang mendasari sebagian penyuluh di Maluku tidak menyusun program penyuluhan pertanian diantaranya karena alasan pembiayaan seperti terlihat pada Gambar 6.



Gambar 6 . Alasan-alasan penyuluh pertanian yang tidak menyusun program penyuluhan di Maluku tahun 2010

Sumber : Analisis data primer, 2010.

Ketidaktersediaan biaya sebagai faktor utama tidak berjalannya penyusunan program

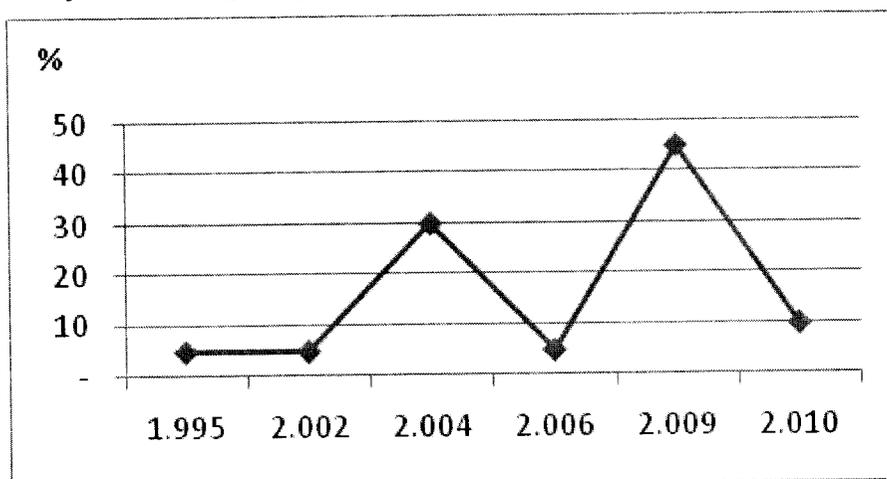
penyuluhan, disebabkan Pemda kabupaten belum menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan

penyuluhan pertanian. Sebagai contoh, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat yang terbentuk sejak tahun 2008, namun lembaga penyuluhan tersebut baru mendapat alokasi anggaran APBD pada tahun 2010, namun hingga Oktober 2010 anggaran tersebut belum dapat dicairkan. Padahal pembiayaan penyuluhan merupakan input yang dibutuhkan untuk memperlancar terselenggaranya penyuluhan pertanian (Wastutiningsih *et al*, 2010). Dilain pihak pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) membebani pembiayaan penyusunan program penyuluhan pertanian desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota pada APBD kabupaten/kota setempat (Departemen Pertanian, 2009). Menurut Sulaiman (2000) dana yang dialokasikan pada lembaga penyuluhan

merupakan salah satu indikator dari persepsi dan komitmen pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah) terhadap lembaga penyuluhan.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyusunan program penyuluhan pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan serta belum didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunannya. Kondisi ini menyebabkan program yang disusun tidak realistis dan belum mencerminkan kebutuhan petani

Karena berbagai alasan seperti pada Gambar 8, menyebabkan sebagian penyuluh terlibat dalam penyusunan program penyuluhan pertanian terakhir kalinya sekitar 16 dan 9 tahun yang lalu. Sementara pada tahun 2010 yang terlibat dalam penyusunan program penyuluhan hanya 10 % penyuluh seperti terlihat pada Gambar 7.

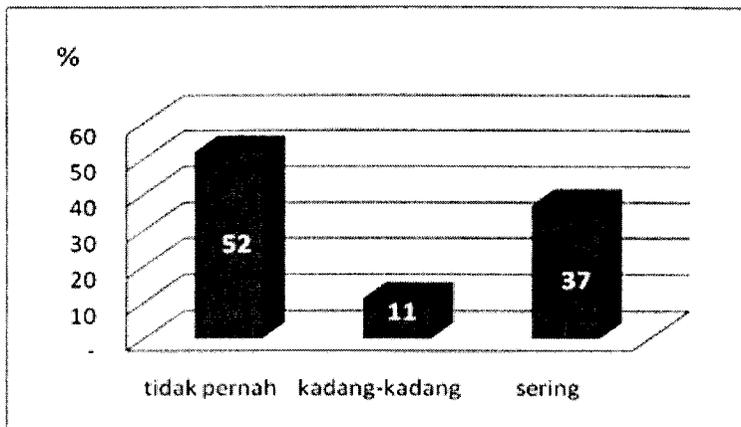


Gambar 7. Profil waktu terakhir kali penyuluh menyusun program penyuluhan pertanian

Sumber: Analisis data primer, 2010

Sesuai Gambar 7 rerata penyuluh yang menyusun program penyuluhan pertanian kurang dari 50 %. Dari persentase tersebut 52 % dari penyuluh yang menyusun program

penyuluhan pertanian ternyata tidak mengintegrasikan program penyuluhannya dengan program pembangunan pertanian yang ada di daerah tersebut (Gambar 8).



Gambar 8 . Profil keaktifan penyuluh dalam mengintegrasikan program penyuluhan dengan program pembangunan pertanian di Maluku tahun 2010

Sumber : Analisis data primer,2010

Gambar 8 menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Maluku belum sejalan dengan program pembangunan pertanian yang dicanangkan oleh Pemerintah baik Pemerintah daerah maupun pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penyuluh di Maluku belum melaksanakan fungsinya sebagai diseminator

yang diandalkan sebagai unjuk tombak akselerasi diseminasi program pembangunan pertanian di pedesaan. Tidak terintegrasinya konten program penyuluhan dengan program pembangunan pertanian di Maluku disebabkan oleh berbagai faktor seperti tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Alasan penyuluh belum mengintegrasikan program penyuluhan dengan program pembangunan pertanian

Alasan	Persentase (%)
Kabupaten tidak pernah mengundang penyuluh rapat teknis	17
PPL tdk tahu harus kemana	34
Tidak ada alokasi anggaran	33
Tidak mengetahui program pembangunan pertanian	17
	100

Sumber : Analisis data primer,2010.

b. Mekanisme Kerja

Yang dimaksud dengan mekanisme kerja dalam hal ini adalah mekanisme penentuan materi penyuluhan yang di dasarkan pada

pendekatan partisipatif yang memungkinkan petani untuk ikut merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menarik manfaat dari kegiatan penyuluhan tersebut.

Penentuan materi penyuluhan seyogyanya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan petani namun 25 % dari penyuluh tidak pernah/jarang mengunjungi petani dan identifikasi permasalahan dan kebutuhan petani. Hal ini disebabkan lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas penyuluhan. 26 % penyuluh menyatakan mereka tidak pernah dievaluasi aktivitasnya. Hal tersebut menyebabkan petani kurang merasa adanya pengaruh penyuluhan dalam pengembangan usahataniannya.

c. Metode

Metode penyuluhan pertanian adalah cara-cara yang digunakan dalam menyuluh, meliputi pendekatan massal, kelompok, dan individu. Pendekatan massal adalah cara penyuluhan yang dilakukan melalui media massa

baik media cetak maupun elektronik. Pendekatan kelompok adalah cara penyuluhan melalui tatap muka dengan sekelompok petani. Pendekatan individu adalah cara penyuluhan melalui tatap muka (face to face communication) antar komunikator dan komunikan (penyuluh dan petani)

1. Pendekatan Massal

Pendekatan penyuluhan secara massal yang dikaji dalam penelitian ini adalah tingkat keaktifan penyuluh di Maluku dalam menyiapkan materi penyuluhan yang disebarluaskan secara massal melalui siaran radio dan TV (media elektronik), dan media cetak (leaflet, brosur, koran). Profil keaktifan penyuluh dalam membuat naskah penyuluhan melalui media elektronik dan cetak Maluku tahun 2010 tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil keaktifan penyuluh dalam membuat naskah penyuluhan melalui media elektronik dan cetak Maluku tahun 2010

Keaktifan	Membuat naskah (%)		
	Radio	TV	Media cetak
Tidak pernah	89,7	96,6	58,6
Jarang	3,4	3,4	6,9
Kadang-kadang	3,4	-	17,2
Sering	3,4	-	17,2
Sangat sering	-	-	-
Total	100,0	100,0	100,0

Sumber : Analisis data primer 2010

Tabel 2. menunjukkan bahwa penyuluh pertanian di Maluku umumnya tidak melakukan penyuluhan dengan pendekatan massal guna

menambah/meningkatkan pengetahuan petani. Alasan yang dikemukakan oleh penyuluh terhadap hal tersebut karena keterbatasan

kemampuan (46,7 %) dan tidak adanya dana dan fasilitas lainnya (50%).

2. Pendekatan Kelompok

Pendekatan kelompok merupakan salah satu bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi kelompok terbagi atas dua yaitu komunikasi kelompok kecil (*small group communication*) dan komunikasi kelompok besar (*large group communication/public speaking*). Menurut DeVito (1997) Kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan dalam jumlah relatif kecil yang memiliki tujuan yang sama, semua anggota bisa berkomunikasi dengan mudah satu sama lain baik sebagai pengirim maupun penerima pesan. Karena itu pendekatan kelompok dalam penyuluhan berperan penting dalam proses persuasi guna mempercepat adopsi

inovasi kepada beberapa klien sekaligus. Beberapa metode penyuluhan yang masuk dalam pendekatan kelompok antara lain adalah pertemuan formal (*formal meeting*), diskusi kelompok, demonstrasi (cara, hasil, cara dan hasil), kursus dan latihan petani, kontes tani (*agricultural shows*), kaji terap (*local verification trials*), temu lapang, *Focus Group Discussion* (FGD), dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan 80 % penyuluh di Maluku melakukan pendekatan kelompok dalam aktivitas penyuluhannya, namun intensitasnya rendah.

Tempat penyuluhan dengan pendekatan kelompok umumnya dilakukan di sekretariat gapoktan, rumah ketua kelompok tani, rumah kepala desa, dan rumah kepala Soa, seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Profil tempat penyuluhan berkelompok di Maluku tahun 2010

Keaktifan	Tempat menyuluh (%)				
	Rumah kades	Rumah Ka Soa	Rumah Ka Kel tani	Paparisa	sekretariat gapoktan
Tidak pernah	41,7	62,5	9,1	29,4	9,1
Jarang	-	-	4,5	-	-
Kadang-kadang	8,3	12,5	9,1	17,6	18,2
Sering	41,7	25,0	54,5	35,3	72,7
Sangat sering	8,3		22,7	17,6	-
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Analisis data primer, 2010

3. Pendekatan Perorangan

Pada pendekatan ini para penyuluh berkomunikasi dengan klien nya bisa secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran perorangan. Komunikasi secara langsung dapat

dilakukan antara lain kunjungan ke rumah/ladang dan sebagainya. Sedangkan komunikasi tidak langsung melalui telepon, email, surat dan lain sebagainya. Kelebihan perorangan adalah penyuluh bisa mengarahkan

pembicaraan pada pokok permasalahan, pembicaraan lebih bersifat kekeluargaan. Kelemahannya pendekatan ini adalah waktu kunjungan hanya pada waktu tertentu dan disesuaikan dengan kesediaan waktu klien. 19,2 % penyuluh di Maluku jarang melakukan penyuluhan dengan pendekatan perorangan dan 3,8 % bahkan tidak pernah melakukan penyuluhan dengan pendekatan perorangan.

d. Materi

Materi adalah konten penyuluhan yang disuluhkan pada aktivitas penyuluhan. Materi penyuluhan yang dikaji dalam penelitian ini

difokuskan pada materi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan meliputi benih/bibit dan pembenihan/pembibitan, perawatan tanaman dalam hal ini adalah pengendalian hama dan penyakit, serta pengolahan hasil dan pemasaran hasil. Sejauhmana materi penyuluhan akan diadopsi sangat tergantung pada sejauhmana penyuluh menyesuaikan konten penyuluhannya dengan kebutuhan dan keinginan kliennya. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar materi penyuluhan perkebunan yang disuluhkan penyuluh pertanian di Maluku umumnya kurang diadopsi oleh petani seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Gambaran tingkat adopsi terhadap materi penyuluhan di Maluku

	Materi penyuluhan yang diadopsi petani		
	Tan pangan	Perkebunan	Peternakan
Jarang	38,0	71,4	33,4
Sering	47,6	28,6	33,3
Sangat sering	14,3	-	33,3
Total	100,0	100,0	100,0

Sumber : Analisis data primer 2010

Tabel 4 memperlihatkan rendahnya efektivitas penyuluhan pertanian di Maluku yang terindikasi dari rendahnya tingkat adopsi terhadap konten penyuluhan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan dinetranya oleh materi penyuluhan yang diberikan kurang sesuai dengan permasalahan pertanian yang dirasakan petani. Selain itu kurangnya efektivitas tersebut diantaranya disebabkan oleh kurangnya kontak interpersonal penyuluh dengan kliennya, materi penyuluhan belum didasarkan pada identifikasi permasalahan yang dirasakan petani, dan lain sebagainya seperti terurai sebelumnya.

e. Jarak Domisil – Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian

40,5 % domisili penyuluh berada pada wilayah yang berbeda dan antar pulau dengan WKPP nya. Hal ini merupakan salah faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Maluku sebagaimana hasil penelitian Wastutiniungsih *et al* (2010) di kabupaten Seram bagian Barat yang menunjukkan bahwa jarak domisili penyuluh ke wilayah binaan berpengaruh negatif terhadap tingkat efektivitas penyuluhan pertanian yang menandakan bahwa semakin jauh jarak domisili

penyuluh pertanian dengan wilayah binaanya (WKPP) maka akan menurunkan tingkat efektivitas penyuluhan pertaniannya.

f. Aksesibilitas Penyuluh Pertanian

1. Akses Transportasi

Jenis transportasi yang digunakan para penyuluh di Maluku dalam menjalankan aktivitas penyuluhannya pada umumnya adalah mobil umum dan sepeda motor. Hal ini mengindikasikan bahwa penyuluh yang lokasi domisilinya berbeda pulau dengan WKPP nya jarang melakukan aktivitas penyuluhan di WKPPnya. Hal ini menyebabkan desa-desa yang hanya bisa diakses melalui transportasi laut, sulit mendapatkan penyuluhan pertanian dari para penyuluh. Hal ini menunjukkan pelaksanaan penyuluhan setempat biasa daratan.

2. Akses Komunikasi

Teknologi Informasi dan komunikasi di bidang pertanian sangat penting peranannya dalam mengembangkan adopsi dan difusi inovasi teknologi pertanian. Dewasa ini dunia cyber berkembang marak sehingga berbagai informasi inovasi teknologi dapat diakses melalui internet sehingga penyuluhan pertanian dapat dilakukan melalui internet (*cyber extension*). Penggunaan *cyber extension* hanya akan optimal bila para penyuluh menguasai teknologi informasi. Pada tahun 2010 sebanyak 13,7 % penyuluh di Maluku dapat menggunakan internet, dan 77 % memiliki alat komunikasi telepon selular (HP). Kepemilikan sarana komunikasi personal ini seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh para penyuluhan dalam memperlancar komunikasi penyuluhan dan pembangunan pertanian.

3. Akses Teknologi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya penyuluh pertanian tentu bergantung pada informasi pembangunan pertanian termasuk informasi teknologi pertanian. Informasi teknologi pertanian dapat diperoleh dari berbagai sumber diantaranya pada lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Namun sebagian besar penyuluh di Maluku belum memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut sebagai sumber informasi inovasi teknologi. Hingga saat ini 80 % penyuluh di Maluku mengandalkan tabloid Sinar Tani yang diterbitkan oleh kementerian Pertanian sebagai sumber informasi teknologi pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat pendidikan penyuluh pertanian di Maluku masih didominasi setingkat SLTA, Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada kinerja penyuluh, yang terlihat dari rerata penyuluh yang menyusun program penyuluhan pertanian hanya 37 % dan dari persentase tersebut 52 % dari penyuluh yang menyusun program penyuluhan ternyata tidak mengintegrasikan program penyuluhannya dengan program pembangunan pertanian yang ada di daerah tersebut. 46,7 % penyuluh kurang mampu dalam menyiapkan naskah penyuluhan dalam bentuk naskah siaran radio dan TV, serta media cetak. Pada tahun 2010 penyuluh di Maluku dapat menggunakan internet baru 13,7 %. 80 % penyuluh mengandalkan tabloid Sinar Tani sebagai sumber informasi teknologi pertanian. Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja penyuluh di wilayah tersebut maka

pengembangan penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan merupakan suatu hal yang mendesak.

50 % penyuluh pertanian di Maluku berumur > 40 tahun, dan 13 % diantaranya akan pensiun dalam waktu kurang dari 10 tahun kedepan. Seyogyanya Pemda Maluku mulai mempersiapkan rencana perekrutan penyuluhan sesuai kualifikasi yang diperlukan penyuluhan pertanian dapat memberikan kontribusinya yang signifikan dalam mengakselerasi proses adopsi dan difusi inovasi teknologi pertanian di pedesaan serta mensukseskan pembangunan pertanian di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2009. Maluku Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Maluku.
- DeVito, 1997. Komunikasi Antar Manusia. Edisi kelima. Profesional Books. Jakarta. Indonesia
- Departemen Pertanian, 2009. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian. <http://cybex.deptan.go.id/files/Permentan.Pengembangan.PDF>. Akses 6 Juni 2011
- Kaliky,R, Bambang Sudaryanto, Nur Hidayat, Sinung Rustijarno, Maman Suherman, Andriko Notosusanto, 2007. Study Kelayakan Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Laporan Akhir Kegiatan Penelitian. Kerjasama Bappeda Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Lembaga Pegkajian Sumberdaya Pertanian (LPSP) Yogyakarta.
- Kincaid,D.L dan Wilbur Schramm, 1977. Asas-Asas Kumunikasi Antar Manusia. Cet 1. LP3S. Jakarta.
- Leilani,A. dan Amri Jahi, 2006. Kinerja Penyuluh Pertanian di Beberapa Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Jurnal Penyuluhan. September 2006, Vol. 2, No. 2. Hal 99-106.
- Pesson, L.L.,1966. Extension program planning with clientele participation. In H.C. Sanders (Ed.), The Cooperative Extension Service. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
- Suryana, A, 2005. Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada Seminar Nasional. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian Melalui Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Mendukung Revitalisasi Pertanian. Prosiding Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian Melalui Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Mendukung Revitalisasi Pertanian.. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembagan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Sulaiman,F., 2000. Faktor-faktor dan Isu yang mempengaruhi Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Makalah, disampaikan dalam Lokakarya Nasional Penyebaran Inovasi Pertanian Era Otonomi Daerah, 15-16 November 2000. Bogor.
- Van den Ban.A.W. dan H.S Hawkins, 1999. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta
- Yustina.I., 2003. Perencanaan Program Penyuluhan. Bagian Administrasi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. ©2003 Digitized by USU digital library. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3721/1/fkm-ida%20yustina.pdf>. Akses 6 Juni 2011
- Wastutiningsih,S.P.,Nur Hidayat, Aliya Bihrajihant Raya, Rahima Kaliky, 2010.Efektifitas Sistem Penyuluhan Pertanian Kepulauan di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Laporan Akhir. Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Penelitian Nomor : 1090 / LB.620/I.1/4/2010 TANGGAL tanggal 6 April 2010. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Bekerjasama dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.